

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lapas Cilacap Ikuti Evaluasi Pembangunan ZI

Narsono Son - CILACAP.INDONESIASATU.CO.ID

May 20, 2022 - 06:12



Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Lapas Cilacap Ikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

CILACAP - Demi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Jajaran Struktural Lapas Kelas IIB Cilacap Ikuti Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Melalui Aplikasi Zoom bersama Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Tengah, (Kamis (19/05/2022)).

Kegiatan evaluasi dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. Bertempat di ruang rapat Lapas Kelas IIB Cilacap.

Hal ini dilakukan Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang wilayah birokrasinya berorientasi pada pelayanan, dan anti-korupsi.

Evaluasi yang serta-merta diikuti oleh Jajaran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah memberikan beberapa arahan terkait pembangunan wilayah birokrasi yang dapat memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

Pembangunan Zona Integritas merupakan pembentukan reformasi birokrasi agar tercipta penegakkan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas serta selalu melakukan perbaikan tiada henti.

WBK dan WBBM merupakan predikat yang disandangkan kepada suatu unit pelaksanaan yang memenuhi sebagian besar grafik dalam perubahan manajemen perubahan, penataan pengaturan SDM, peningkatan pengawasan, penguatan pemeliharaan kamtib, serta penguatan keseimbangan kinerja.

Kakanwil Kemenkumham Jateng A Yuspahrudin Menyampaikan, Tujuan utama program ini adalah untuk mencegah segala jenis tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pelayanan. Dimana dalam pengamalannya agar senantiasa dapat meningkatkan sinergi, akuntabilitas bekerja, serta mengadakan pengarahannya atau penyuluhan tentang gerakan anti gratifikasi, anti pungli, dan penanggulangan korupsi.

"Negara yang maju, harus memiliki kualitas wilayah birokrasi yang mumpuni. Bersemangat dalam melayani masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD. Anti-KKN, anti pungli, anti gratifikasi", Ucap Kakanwil.

(N.SoN/***)